



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHYAR
2. Jabatan : KEPALA UNIT
3. NHK : 443616

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.482.310.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. Tanah Seluas 13000 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA BIMA, WARISAN Rp. 87.000.000
5. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BIMA, WARISAN Rp. 90.000.000
6. Tanah Seluas 8000 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 92.000.000
7. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
8. Tanah Seluas 1151 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 195.670.000
9. Tanah Seluas 1192 m2 di KAB / KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 202.640.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 4000 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 520.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 220.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR VGT Tahun 2014,
HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 45.400.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 15.642.470

F. HARTA LAINNYA

Rp. 100.000.000

Sub Total

Rp. 2.863.352.470

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.863.352.470

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.